

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, KODE ETIK AKUNTAN,  
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN  
DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH**

**Abdul Lathif\***

[lathif1997@gmail.com](mailto:lathif1997@gmail.com)

**Nur Diana\*\*, dan M Cholid Mawardi\*\*\***

**Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang**

**ABSTRACT**

*This study aims to determine: (1) The influence of human resource competence on the quality of regional financial statements, (2) The influence of the Accountant Code of Ethics on the quality of regional financial reports, (3) The effect of the application of government accounting standards on the quality of regional financial statements, (4) The effect of the application of the regional financial accounting system on the quality of the regional financial statements, (5) The effect of the application of the competence of human resources, the code of ethics of accountants, the application of government accounting standards, the application of the regional financial accounting system to the quality of regional financial statements. This research is a quantitative study, the population in this study was 22 SKPD in Malang district government. Data collection techniques with questionnaires distributed to 66 respondents. Test data quality using validity and reliability. Analysis prerequisite tests include normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test. Data analysis techniques using simple regression analysis techniques and multiple linear regression analysis. The results of this study are there are influences on human resource competence, accountant code of ethics, SAP application, and application of regional financial accounting systems to the quality of regional financial reports. F test results showed an F value of 7.203, and Sig.F of 0.000, therefore H<sub>0</sub> was rejected and H<sub>1</sub> was accepted.*

**Keywords:** *Quality of regional financial statements, code of ethics of accountants, application of SAP and application of a regional financial accounting systems.*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Untuk menerbitkan laporan keuangan yang berkualitas tentunya harus ada pengelolaan keuangan yang baik. Pengelolaan keuangan sektor pemerintah contohnya, khususnya pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengelola keuangan secara tertib agar terbentuk suatu pelaporan finansial yang baik. Pelaporan yang disusun tentunya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*bpk.go.id, 2018*). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan produk dari pengelolaan keuangan pemerintah daerah. LKPD yang disusun diakhir periode menjadi salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakatnya. Komponen dari laporan keuangan tersebut terdiri dari LRA, Neraca, LPSAL, LO, LPE, LAK dan CaLK, yang mana penyajiannya berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber dana merupakan tujuan dari penyajian informasi pelaporan finansial, realisasi anggaran dan penilaian kinerja finansial yang disusun pemda. Atas dasar tersebut maka laporan keuangan tersebut harus memiliki kualitas yang baik. Kualitas laporan keuangan menjadikan bukti baik dan tidaknya atas laporan yang dibuat oleh pengelola keuangan.

Menurut Pujanira (2017) Kualitas laporan keuangan daerah dipengaruhi oleh faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Menurut Wati, dkk (2014) Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh Standar Akuntansi Pemerintahan, hal ini berdasarkan

penelitian yang dilakukan oleh Vicky (2013) yang hasilnya pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan arah positif sebesar 49,1%.

Sejak diterbitkannya PP No.71 Thn 2010 sistem pencatatan menjadi berbasis akrual. Pencatatan secara akrual membutuhkan sistem akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk mengelola informasi maka penerapan SAPD. LKPD merupakan output dari SKPD. Adanya Sistem Keuangan yang baik akan menciptakan lingkungan pemerintah yang *good government governance*.

Dari uraian tersebut memiliki judul yaitu, **“Pengaruh Sumber Daya Manusia (SDM), Kode Etik Akuntan, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan SAKD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Bagaimana pengaruh Kode Etik Akuntan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
3. Bagaimana pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
4. Bagaimana pengaruh Sistem akuntansi keuangan daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
5. Bagaimana pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kode Etik Akuntan, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan tinjauan teori dan penelitian terdahulu, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Kode Etik Akuntan terhadap Kualitas LKPD

3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap Kualitas LKPD
4. Untuk mengetahui pengaruh Sistem akuntansi keuangan daerah terhadap Kualitas LKPD.
5. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kode Etik Akuntan, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas LKPD.

#### 1.4 Kontribusi Penelitian

- Bagi Peneliti

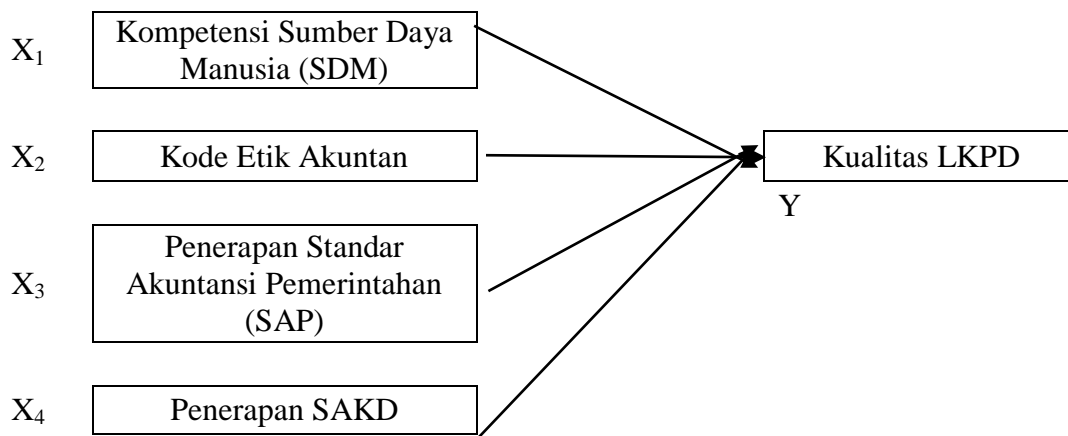
Hasil penelitian ini dapat menjadi sarana pengembangan berpikir kritis terhadap isu-isu perkembangan di dunia riset akuntansi dan mampu menemukan sebuah solusi atas problematika yang ada dibidang akuntansi. Serta menambah pengetahuan dan mampu memahami kualitas laporan keuangan.

- Bagi Pemerintah

Dapat digunakan sebagai bahan kajian dan masukan dalam rangka perbaikan dan pengembangan sumber daya manusia khususnya pegawai pemerintah untuk pengelolaan keuangan sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

## II. KERANGKA TEORITIS PENGEMBANGAN TEORITIS

### 2.1 Kerangka Teori



Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu dan tinjauan teori digambarkan kerangka teoritis berikut :

### **Gambar 1 Kerangka Teoritis**

## **2.2 Pengembangan Teori**

Pengembangan teori yang digunakan dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut :

H1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia ( $X_1$ ), Kode Etik Akuntan ( $X_2$ ), Penerapan SAP ( $X_3$ ), Penerapan SAKD ( $X_4$ ) berpengaruh terhadap Kualitas LKPD (Y).

H1a: Kompetensi SDM ( $X_1$ ) berpengaruh terhadap Kualitas LKPD (Y).

H1b : Kompetensi Kode Etik Akuntan ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap Kualitas LKPD (Y).

H1c : Penerapan SAP ( $X_3$ ) berpengaruh terhadap Kualitas LKPD (Y)

H1d : Penerapan SAKD ( $X_4$ ) berpengaruh terhadap Kualitas LKPD (Y)

## **III. METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1 Metode Pengumpulan Data**

Metode Pengumpulan data yakni dengan angket atau kuesioner yang dimana peneliti menyebarkan kuisisioner kepada responden untuk kemudian responden menjawab pertanyaan yang ada di kuisisioner.

### **3.2 Pengukuran dan Operasional Variabel**

#### **3.2.1 Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Definisi laporan keuangan daerah menurut Baridwan (2000: 17) yaitu: “Laporan Keuangan daerah merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan”. Pengertian laporan keuangan menurut SAK adalah penyajian pelaporan keuangan yang berupa laporan laba rugi, perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

#### **Kompetensi Sumber Daya Manusia**

“Sumber Daya Manusia menurut M.T.E Hariandja (2002) menjelaskan bahwa Sumber Daya Manusia adalah salah satu faktor yang paling utama pada

suatu perusahaan di lihat dari faktor lainnya selain modal. Maka dari itu SDM sangat di perlukan untuk di kelola dengan baik agar efektivitas dan efisiensi organisasi Semakin meningkat baik.” Menurut *The Chartered Institute of Personnel and Development* (CIPD) sumber daya manusia adalah cara yang dilakukan untuk memaksimalkan kinerja seseorang dengan perancangan, pelaksanaan dan pemeliharaan.

### **Kode Etik Akuntan**

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam *iaiglobal.or.id*. Kode Etik adalah aturan yang dibuat secara tertulis berdasarkan pedoman moral. Adapun tujuan dari kode etik itu sendiri adalah *pertama*, supaya professional dapat memberikan jasa yang terbaik bagi pemakainya. *Kedua*, sebagai pelindung dari perbuatan yang tidak profesional. Sehingga yang dimaksud kode etik akuntan adalah aturan tertulis yang sistematis disusun oleh profesional akuntan berdasarkan prinsip moral yang bertujuan untuk mengatur para profesi akuntan. Adapun Rerangka dari kode Etik Akuntan Indonesia terdiri dari 4 bagian, yang terdiri dari 1) Prinsip Etika, 2) Aturan Etika, 3) interpretasi, 4) Tanya Jawab.

#### **3.2.2 Penerapan SAP**

Pedoman akuntansi yang digunakan untuk penyusunan serta penyajian laporan finansial pemerintah ini dinamakan SAP. Dalam hal ini sudah diatur dalam PP No.71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan yang menggantikan PP No.24 tahun 2005 yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). Setelah diresmikan aturan tersebut pemerintah pusat dan daerah harus menerapkan sistem akuntansi akrual penuh (*full accrual accounting*) tidak lagi menggunakan *cash towards accrual*.

#### **3.2.3 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Menurut Mahmudi (2016:45) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah. Sistem akuntansi

pemerintah daerah terdiri dari dua bagian utama yaitu pertama, sistem akuntansi bendahara umum daerah pada satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD). Kedua, Sistem Akuntansi Instansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

#### **IV. ANALISIS DATA**

##### **4.1 Statistik Deskriptif**

Nilai minimum kualitas laporan keuangan daerah 3, nilai maksimum 4. variabel ini mempunyai nilai standar deviasi 0,505 dan rata-rata 3,48. Nilai minimum kompetensi sumber daya manusia 3, nilai maksimum 4. variabel ini mempunyai nilai standar deviasi 0,479 dan rata-rata 3,34. Nilai minimum kode etik akuntan 3, nilai maksimum .4 variabel ini mempunyai nilai standar deviasi 0,495 dan rata-rata 3,40. Nilai minimum penerapan SAP 2, nilai maksimum 4. variabel ini mempunyai nilai standar deviasi 0,476 dan rata-rata 3,24. Nilai minimum penerapan sistem akuntansi keuangan daerah 3, nilai maksimum 4. variabel ini mempunyai nilai standar deviasi 3,42 dan rata-rata 0,499.

##### **4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas**

###### **1. Validitas**

Hasil penelitian dapat dikatakan valid apabila nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel dan jika nilai  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel, maka item tersebut tidak valid. Dengan menggunakan responden sebanyak 50 dan nilai signifikansi 5% maka diperoleh  $r$  tabel 0.273. seluruh item pertanyaan dalam penelitian ini valid, disebabkan nilai  $r$  tabel lebih kecil dari  $r$  hitung.

###### **2. Reliabilitas**

Seluruh variabel memiliki nilai koefisien *Cronbach Alpha* lebih besar 0,60 dengan nilai variabel Kualitas LKPD sebesar 0,742, Kompetensi SDM dengan nilai 0,856, Kode Etik Akuntan dengan nilai 0,873, Penerapan SAP dengan nilai 0,862, Penerapan SAKD dengan nilai 0,827. Sehingga bermakna instrument pertanyaan yang digunakan dalam riset ini sudah reliabel atau dapat diandalkan.

### 4.3 Uji Normalitas

*Kolmogorov-Smirnov* adalah uji yang dilakukan pada uji ini yaitu dengan ketentuan nilai probabilitas atau *Asymp Sig. (2 Tailed)* > 0,05 maka dikatakan normalitas terpenuhi. Diketahui nilai probabilitas atau *Asymp Sig. (2 Tailed)* > 0,05 maka variabel kualitas LKPD memiliki nilai 0,263, variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai 0,576, kode etik akuntan memiliki nilai 0,370, variabel penerapan SAP memiliki nilai 0,489 dan untuk variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah memiliki nilai 0,109. Dan semua variabel yang terdapat di penelitian ini terdistribusi normal.

### 4.4 Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian dilakukan dengan pengujian statistik uji *Glejser* yang dilakukan beserta meregresi variabel independen terhadap nilai absolut di residualnya. Nilai signifikansi Kompetensi SDM sebesar 0,871. Variabel kode etik akuntan sebesar 0,255. Variabel penerapan SAP memiliki nilai signifikansi 0,479. Dan untuk nilai signifikansi penerapan SAKD adalah 0,399. Disimpulkan nilai signifikansi seluruh variabel >  $\alpha$  ( $\alpha = 0,05$ ). Jadi tidak terjadi adanya heteroskedastisitas dan asumsi non-heteroskedastisitas telah terpenuhi.

#### 2. Uji multikolinearitas

Dijelaskan bahwa nilai *VIF* kompetensi sumber daya manusia senilai 1,081, kode etik akuntan senilai 1,200, penerapan SAP senilai 1,057 dan penerapan SAKD senilai 1,097, yaitu dengan nilai < 10 dan nilai *tolerance* kompetensi sumber daya manusia senilai 0,925, kode etik akuntan senilai 0,833, penerapan SAP senilai 0,946 dan penerapan SAKD senilai 0,912 yaitu dengan nilai > 0,1 bahwa tidak terjadi adanya korelasi di antara variabel. Jadi pengujian dijelaskan berarti tidak adanya gejala multikolinearitas di antara variabel independen.

### 4.5 Analisis regresi linier berganda

Persamaan regresi berganda dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = 5,241 + 0,238X_1 \quad + (0,000)X_2 \quad + 0,001X_3 \quad + 0,114X_4 \quad + 9,334$$

sig. 0,000                      sig. 0,996                      sig. 0,994                      sig. 0,287



## 4.6 Uji Hipotesis

### 1. Uji F (simultan)

Nilai F sebesar 7,203 serta Sig.f sebesar 0,000, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kompetensi SDM (X1), Kode Etik Akuntan (X2), Penerapan SAP (X3) dan Penerapan SAKD (X4) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah(Y).

### 2. Uji Determinasi

Nilai *Adjusted R square* yaitu 0,336, yang bermakna 33,6% variabel dependen kualitas LKPD (Y) dapat dijelaskan oleh variabel kompetensi SDM (X1), kode etik akuntan (X2), penerapan SAP (X3), penerapan SAKD (X4). Sedangkan sisanya yaitu 66,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian .

### 3. Hasil Uji Parsial (Uji t)

#### 1. Kompetensi sumber daya manusia

nilai uji statistik uji t sebesar 4,768 dan nilai signifikan t dengan nilai 0,000. Nilai signifikan t lebih kecil dari pada  $\alpha = 0,05$ . Pengujian ini menunjukkan bahwa  $H_{0a}$  ditolak dan  $H_{1a}$  diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 (kompetensi sumber daya manusia) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan Daerah). Dengan kata lain, semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan daerah.

#### 2. Kode Etik Akuntan

Nilai uji statistik uji t sebesar 0,005 dan nilai signifikan t sebesar 0,996. Nilai signifikan t lebih kecil dari pada  $\alpha = 0,05$ . Pengujian ini menunjukkan bahwa  $H_{0a}$  diterima dan  $H_{1a}$  ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X2 (kode etik akuntan) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan Daerah).

#### 3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Uji statistik uji t dengan nilai 0,007 dan signifikan t dengan nilai 0,994. Nilai signifikan t lebih besar dari pada  $\alpha = 0,05$ . Pengujian ini menunjukkan

bahwa  $H_0a$  diterima dan  $H_{1a}$  ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel  $X_3$  (penerapan standar akuntansi pemerintah) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel  $Y$  (Kualitas Laporan Keuangan Daerah).

#### 4. Penerapan SAKD

Uji statistik uji  $t$  dengan nilai 1,078 dan signifikan  $t$  dengan nilai 0,287. Nilai signifikan  $t$  lebih besar dari pada  $\alpha = 0,05$ . Pengujian ini menunjukkan bahwa  $H_0a$  diterima dan  $H_{1a}$  ditolak sehingga mempunyai arti variabel  $X_4$  (penerapan SAKD) tidak berpengaruh pada variabel  $Y$  (Kualitas LKPD).

## V. PEMBAHASAN DAN SIMPULAN

Dalam penelitian ini diambil sampel sebanyak 66 responden di seluruh pegawai keuangan yang ada di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kabupaten malang. Pengambilan data dilakukan mulai tanggal 4 sampai 12 januari 2020.

### 1. Pengaruh simultan kompetensi SDM ( $x_1$ ), kode etik akuntan ( $x_2$ ), penerapan SAP ( $x_3$ ) dan penerapan SAKD ( $x_4$ ) terhadap kualitas LKPD ( $y$ ).

Digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi sumber daya manusia ( $X_1$ ), kode etik akuntan ( $X_2$ ), penerapan SAP ( $X_3$ ), penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan secara bersama-sama ini yang dimaksud uji  $F$ . Uji yang terselesaikan menunjukkan nilai signifikan  $F$  sebesar 0,000 jadi signifikansi  $F < \alpha$  adalah  $0,000 < 0,05$ . Berarti  $H_0$  ditolak, jadi ada pengaruh signifikan antar variabel independen terhadap kualitas laporan keuangan secara simultan. Jika dilihat dari nilai *Adjust R Square* yang didapat variabel dependen memiliki pengaruh sebesar 33,6% memengaruhi kualitas laporan keuangan, sisanya 66,4% dipengaruhi variabel lain diluar penelitian ini.

### 2. Pengaruh kompetensi SDM ( $x_1$ ) terhadap kualitas LKPD ( $y$ )

Dalam metode regresi berganda, didapat nilai  $t$  hitung 4,768 serta sig.  $t$  0,000 dan  $t_{tabel}$  2,009 jadi variabel ini memiliki pengaruh terhadap kualitas LKPD. Nilai signifikansi  $t$  0,000 lebih rendah dari alpha  $0,000 < 0,05$ . Bisa disimpulkan kompetensi sumber daya manusia adanya pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

**3. Pengaruh kode etik akuntan ( $x_2$ ) terhadap kualitas LKPD ( $y$ )**

Dalam metode regresi berganda, didapat nilai  $t$  hitung 0,005 serta sig.  $t$  0,996 dan  $t_{\text{tabel}}$  2,009 jadi variabel ini tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai signifikansi  $t$  0,996 lebih tinggi dari alpha  $0,000 < 0,05$ . Bisa disimpulkan kode etik akuntan tidak adanya pengaruh terhadap kualitas LKPD.

**4. Pengaruh penerapan SAP ( $x_3$ ) terhadap kualitas LKPD ( $y$ )**

Dalam metode regresi berganda, didapat nilai  $t$  hitung 0,007 serta sig.  $t$  0,994 dan  $t_{\text{tabel}}$  2,009 jadi variabel ini tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai signifikansi  $t$  0,994 lebih tinggi dari alpha  $0,000 < 0,05$ . Bisa disimpulkan penerapan SAP tidak adanya pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

**5. Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah ( $x_4$ ) terhadap kualitas LKPD ( $y$ )**

Dalam metode regresi berganda, didapat nilai  $t$  hitung 0,078 serta sig.  $t$  0,287 dan  $t_{\text{tabel}}$  2,009 jadi variabel ini tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai signifikansi  $t$  0,996 lebih tinggi dari alpha  $0,000 < 0,05$ . Bisa disimpulkan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas LKPD.

**Kesimpulan**

1. Penelitian secara simultan membuktikan bahwa variabel bebas berpengaruh atau secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Artinya, “kompetensi sumber daya manusia, kode etik akuntan, penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah”.
2. Penelitian secara parsial membuktikan bahwa kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya sebaik apapun kompetensi sumber daya manusia, maka berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.” Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Wati (2014) bahwa variabel kompetensi SDM merupakan faktor yang dapat memengaruhi LKPD
3. Penelitian secara parsial membuktikan bahwa kode etik akuntan tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Artinya seprofesional apapun seorang pegawai keuangan

- yang memegang kode etik akuntan, maka tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
- 4 Penelitian secara parsial membuktikan bahwa penerapan SAP tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Artinya sebaik apapun SAP diterapkan, maka tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2014) bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah merupakan faktor yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan daerah.
  - 5 Penelitian secara parsial membuktikan bahwa penerapan SAKD tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Artinya sebaik apapun sistem akuntansi pemerintah daerah diterapkan, maka tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Pujanira (2017) bahwa “variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan faktor yang dapat memengaruhi kualitas LKPD.”

#### DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki. 2000. Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode. Yogyakarta : BPF
- Fakultas Ekonomi Unisma, 2004, Panduan Usulan Penelitian dan Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang, BPF Unisma, Malang.
- Hariandja Hal 3. (2002). Manajemen Sumber Daya Manusia Hal 3. *Manajemen Sumber Daya Manusia Hal 3*.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tentang Kode Etik Akuntan. Diakses Pada Tanggal 29 september 2019. Diakses dari <http://iaiglobal.or.id>.
- PP Nomor 71 tahun 2010. Diakses pada tanggal 21 September 2019 dari <http://www.djpk.depkeu.go.id>
- PP Nomor 58 tahun 2005. Tentang pengelolaan keuangan daerah.
- Pujanira, Putriasri (2017). “Pengaruh Kompetensi Sumber daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Pemerintah DIY” *Jurnal Nominal Tahun 2017Vol VI No 2*.
- Sugiyono. (2012). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Umar, Husein. (2011). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*.

Lasoma, Vicky A. (2012). “Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara”. *Jurnal Akuntansi Vol. 2. No.1*

Wati Kadek D., Nyoman T.H., dan Ni Kadek S. (2014). “Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah”. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Vol 2 No. 1.*

Yadiati., Winwin dan Abdullah M. (2017). *Kualitas Pelaporan Keuangan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

\*) Abdul Lathif adalah Alumni Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.

\*\*\*) Nur Diana adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.

\*\*\*\*) M Cholid Mawardi adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.